



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis perlu menetapkan indikator kinerja utama yang merupakan dasar terhadap pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);

20. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
22. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
24. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) dan Penetapan Kinerja;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 19 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2004 Nomor 19);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 07);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bengkalis.
6. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
7. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode satu tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025, yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Bengkalis.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 – 2015 yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah rencana pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah rencana pembangunan tahunan SKPD yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah rencana 5 (lima) tahunan yang menggambarkan visi, misi, analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
16. Kinerja organisasi perangkat daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
18. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
19. Pemantauan kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi : (1) hasil pengukuran kinerja, dan (2) identifikasi, analisa serta antisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
20. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
21. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
22. Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
23. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
24. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsi keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Tujuan penetapan indikator kinerja utama adalah :
 - a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja dengan baik;
 - b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Fungsi penetapan indikator kinerja utama adalah :
 - a. memperjelas tentang apa, berapa dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan SKPD;
 - b. menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan dan dalam menilai kinerjanya termasuk kinerja SKPD;
 - c. membangun dasar bagi pengukuran, analisa, dan evaluasi kinerja SKPD.

Pasal 3

Setiap SKPD wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing

BAB III PENGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 4

Indikator kinerja utama digunakan oleh SKPD untuk :

- a. Perencanaan jangka menengah;
- b. Perencanaan tahunan;
- c. Perencanaan anggaran;
- d. Penyusunan dokumen Penetapan Kinerja;
- e. Pengukuran kinerja;
- f. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
- g. Evaluasi Kinerja instansi pemerintah; dan
- h. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

BAB IV URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

Uraian Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tertuang dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V
PEMBINAAN DAN KOORDINASI**

Pasal 6

Pimpinan SKPD melakukan :

- a. pembinaan dalam rangka pengembangan dan penetapan indikator kinerja utama dilingkungan masing-masing;
- b. koordinasi dalam rangka pengintegrasian sistem pengukuran kinerja dengan sistem administrasi pemerintahan yang lain, seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban.

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat.
- (2) Inspektorat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis

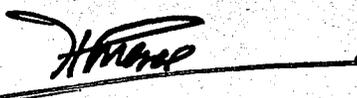
pada tanggal 9 FEBRUARI 2012

BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS


Drs. H. ASMARAN HASAN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19550720 198003 1 008

**BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2012 NOMOR**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 5 TAHUN 2012

TANGGAL : 9 FEBRUARI 2012

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KABUPATEN BENGKALIS 2010 – 2015

NO	MISI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan Kualitas SDM terutama Pembangunan sektor Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan pendidikan bagi masyarakat	Angka melek huruf	%	
			Angka partisipasi kasar	%	
			Angka partisipasi murni	%	
			Angka partisipasi sekolah	%	
			Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah	Angka	
			Rasio siswa per Guru (R-S/G)	Angka	
			Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (Tidak buta aksara)	%	
			Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	
			Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	%	
			Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	
			Angka Putus Sekolah (APS)	%	
			Angka Kelulusan (AL)	%	
			Angka Melanjutkan (AM) Sekolah	%	
			Guru Yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	%	
		Meningkatnya pemahaman akan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal	Jumlah Group Kesenian Aktif	Jumlah	
			Jumlah Kelompok Budaya yang dibina	Jumlah	
			Jumlah Kegiatan/ Pertunjukan Budaya	Jumlah	
			Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	
		Tumbuhnya Minat Baca Masyarakat	Jumlah Perpustakaan	Jumlah	
			Jumlah Pengunjung Perpustakaan pertahun	Jumlah	
			Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah	Jumlah	
		Meningkatnya Akses dan Mutu Layanan Kesehatan Bagi Masyarakat	Angka Kelangsungan hidup bayi	Angka	
			Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	
			Persentase Balita Gizi Buruk	%	
			Rasio Posyandu per satuan Balita	Angka	
			Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan Penduduk	Angka	
			Rasio Rumah sakit per satuan Penduduk	Angka	
			Rasio Dokter per satuan Penduduk (Dokter Umum, Spesialis dan Dokter Gigi)	Angka	
			Rasio Tenaga Medis per satuan Penduduk (Bidan, Perawat, Apoteker, Ahli Gizi, Kesmas dan Sanitarian)	Angka	
		Meningkatnya Kualitas dan jangkauan Layanan Keluarga Berencana	Rata- rata Jumlah Anak per Keluarga	Angka	
			Rasio Akseptor KB	%	
			Cakupan Peserta KB Aktif	%	
			Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	Angka	
		Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Pengurusutaman Gender, Perempuan dan Anak	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	%	
			Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	%	
			Rasio KDRT	Angka	
Persentase Jumlah Tenaga Kerja dibawah Umur	%				

			Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%		
			Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindakan Kekerasan	%		
		Meningkatnya Cakupan Layanan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	%		
			Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan	%		
			Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%		
			Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat Perawatan	%		
			Cakupan Penemuan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	%		
			Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	%		
			Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan Pasien Masyarakat Miskin	%		
			Cakupan Kunjungan Bayi	%		
			Cakupan Puskesmas	%		
			Cakupan Pembantu Puskesmas	%		
			Tercapainya administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah	Rasio Penduduk ber KTP per satuan Penduduk	%	
				Rasio Bayi berakte Kelahiran	%	
				Rasio Pasangan Berakte Nikah	%	
		Kepemilikan KTP		Jumlah		
		Kepemilikan Akte Kelahiran per 1000 Penduduk		%		
		Ketersediaan Data Base Kependudukan		Ada/Tidak Ada		
		Meningkatnya Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah/ Belum		
			Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun	Angka		
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%		
		Meningkatnya Lapangan Usaha dan Kesempatan Kerja	Rasio Lulusan S1/S2/S3	%		
			Rasio Penduduk yang bekerja	%		
			Angka Partisipasi Angkatan Kerja	%		
			Tingkat Pengangguran terbuka	%		
			Rasio Ketergantungan	%		
		Meningkatnya Partisipasi Generasi Muda dalam Pembangunan	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	%		
			Jumlah Organisasi Pemuda dan Olahraga	Angka		
			Jumlah Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga	Angka		
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pemuda	%		
2.	Menanggulangi Kemiskinan dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, Perekonomian Pedesaan serta Kelompok Masyarakat Minoritas dan Terpinggirkan	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan	%		
			Angka Kemiskinan	Angka		
		Meningkatnya Kualitas Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi	Jumlah		
			PMKS yang Memperoleh bantuan Sosial	%		
			Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertangani	%		
Meningkatnya Kunjungan Wisata	Kunjungan Wisata	Angka				
3.	Mengembangkan Perekonomian Daerah dan Masyarakat serta Meningkatkan Investasi dan UMKM dengan Memanfaatkan Kekayaan Sumber Daya Alam yang Terbarukan	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Rasio Pemenuhan Kebutuhan Pangan	%		
			Persentase Kebutuhan Ketahanan Pangan yang dapat dipenuhi oleh produksi pertanian Daerah	%		
			Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB	%		
			Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB	%		

			Persentase PAD dari Sektor Perikanan	%	
			Cakupan Bina Kelompok Nelayan	%	
			Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	%	
			Persentase Desa yang telah memenuhi Swasembada Pangan terhadap Total Desa	%	
	Meningkatnya Produksi Perkebunan dan Kehutanan		Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB	%	
			Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	%	
			Kerusakan Kawasan Hutan	%	
			Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB	%	
	Berkembangnya Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah		Persentase Koperasi Aktif	%	
			Jumlah UKM non BPR/LKM	Unit	
			Jumlah BPR/LKM	Unit	
			Jumlah Usaha Micro dan Kecil yang Aktif	%	
	Meningkatnya Iklim Investasi yang Kondusif		Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Angka	
			Jumlah Nilai Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Angka	
			Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	%	
	Meningkatnya Kapasitas Produksi bagi Industri Daerah		Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	%	
			Kontribusi Industri Rumah Tangga terhadap PDRB sektor Industri	%	
			Jumlah Perusahaan yang terdaftar yang bergerak di sektor usaha Perindustrian	Angka	
			Jumlah Investasi baru dibidang usaha Industri	Angka	
	Meningkatnya Perdagangan dan Luasnya Pemasaran		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	
			Jumlah Perusahaan yang terdaftar yang bergerak di sektor usaha Perdagangan	Angka	
			Cakupan Bina Kelompok Perdagangan/ Usaha Informal	%	
4.	Meningkatkan Infrastruktur Daerah antara lain Peningkatan Prasarana Jalan, Jembatan, Pelabuhan, Energi Listrik, Pengelolaan Sumber Daya Air, Pengelolaan Lingkungan, Penataan Ruang dan Perumahan	Meningkatnya Kualitas Jalan dan Jembatan	Proporsi Panjang jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	%	
			Panjang Jalan Dilalui Roda Empat	KM	
			Jalan penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Pemukiman Penduduk (Minimal Dilalui Roda Empat)	%	
			Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (>40 KM/Jam)	%	
		Meningkatnya Kualitas Jaringan Pengairan	Rasio Jaringan Irigasi	%	
			Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air tidak tersumbat	%	
			Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor Lingkup Kewenangan Kota	%	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	Angka	
			Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	Angka	
			Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Angka	
			Pemasangan Rambu-rambu	%	
		Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kelistrikan	Rasio Ketersediaan daya Listrik	%	
			Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik	%	
		Meningkatnya Fasilitas Permukiman	Rumah Tangga Pengguna Listrik	%	
			Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	%	
			Rumah Tangga Ber- Sanitasi	%	

			Rasio Tempat Pemakaman Umum per satuan Penduduk	Angka	
			Rasio Tempat Pembuangan sampah (TPS) per Satuan Penduduk	Angka	
	Terpenuhinya Ketersediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Miskin		Rumah Layak Huni	%	
			Lingkungan Pemukiman Kumuh	%	
			Persentase Rumah Tinggal ber – Sanitasi	%	
			Rasio Rumah Layak Huni	Angka	
			Rasio Pemukiman Layak Huni	Angka	
			Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih	%	
	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup		Persentase Penanganan sampah	%	
			Persentase Penduduk berakses Air Minum	%	
			Persentase Luas Pemukiman yang Tertata	%	
			Pencemaran Status Mutru Air	%	
			Cakupan Penghijauan Wilayah Rawan Longsor dan Sumber Mata Air	%	
			Cakupan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Amdal	%	
			Tempat Pembuangan Sampah Persatuan Penduduk	%	
			Penegakan Hukum Lingkungan	%	
			Rasio Bangunan ber IMB per Satuan Bangunan	%	
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang		Persentase Luas Lahan bersertifikat	%	
			Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	
			Penyelesaian Izin Lokasi	%	
			Persentase Penduduk yang memiliki Lahan	%	
			Sempadan Jalan yang dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar	%	
			Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar	%	
			Ketaatan Terhadap RTRW	%	
			Luas Wilayah Produktif	%	
			Luas Wilayah Industri	%	
			Luas Wilayah Kebanjiran	%	
			Luas Wilayah Kekeringan	%	
			Luas Wilayah Perkotaan	%	
5.		Mengimplementasikan Desentralisasi Politik, Keuangan dan Administrasi dalam Sistem Pemerintah Daerah serta Melaksanakan Tata Kelola Pemerintah yang Baik (Good Governance)	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase PNS yang mendapat hukuman disiplin	%
	Rata- rata tingkat kehadiran PNS dalam 1 Tahun			Angka	
	Persentase PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan sesuai dengan tugas yang menjadi tanggungjawabnya			%	
	Persentase pejabat struktural yang telah lulus diklatpim			%	
	Persentase PNS yang berpendidikan S1, S2 dan S3			%	
	Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Fungsional			Angka	
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah SKPD yang telah menyusun Laporan Kinerja	Angka	
			Jumlah SKPD yang telah memiliki Indikator Kinerja Utama	Angka	
			Persentase Satker yang kelembagaannya telah seseuai dengan kebutuhan dan peraturan	%	
			Jumlah SKPD yang telah dievaluasi SOTK	Angka	

	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Temuan dalam Pemeriksaan Internal dan Eksternal	Angka	
		Jumlah Temuan Pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti	Angka	
	Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi Daerah	Sistem Informasi Manajemen PEMDA	Jumlah	
		Buku " Kabupaten Dalam Angka "	Ada/Tidak Ada	
		Buku " PDRB Kabupaten "	Ada/Tidak Ada	
		Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal	Ada/Tidak Ada	
		Jumlah Penyiaran Radio/ TV Lokal	Ada/Tidak Ada	
		Web Site Milik Pemerintah Daerah	Ada/Tidak Ada	
	Meningkatnya Pendapatan dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio wajib pajak daerah (income tax ratio)	%	
		Persentase potensi penerimaan daerah yang dapat digali	%	
		Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah	Angka	
	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Penegakan Perda	%	
		Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	Angka	
		Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Desa/Kelurahan	Angka	
		Cakupan Patroli Petugas Satpol PP	Kali/ 24 Jam	
		Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten	%	
		Angka Kriminalitas	%	
		Angka Kriminalitas yang Tertangani	%	
	Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Penanggulangan Korban Bencana	Jumlah LINMAS per Jumlah 10.000 Penduduk	Angka	
		Petugas perlindungan Masyarakat (LINMAS) di Kabupaten	%	
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten		%		
Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)		%		
Meningkatnya Kualitas Kehidupan Demokrasi, serta Penegakan Hukum dan HAM	Jumlah pelanggaran terhadap HAM dan jumlah pengaduan masyarakat tentang pelanggaran hukum	Jumlah		
	Persentase permasalahan hukum dan HAM yang dapat diselesaikan	%		

BUPATI BENGKALIS



H. HERLIYAN SALEH